

MENJAMIN KEAMANAN MELALUI KEHARMONISAN: UPAYA MENJAGA STABILITAS SOSIAL DI TENGAH KEANEKARAGAMAN BUDAYA SINGAPURA

Mutia Hudo¹, Nur Isdah Idris²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanudin

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹mutiahudo1578@gmail.com

²Nurisdah@unhas.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas

Abstrak

Singapura adalah negara yang sangat multikultural dengan keanekaragaman etnis, agama, dan budaya yang kaya, sehingga menjadi salah satu contoh paling menonjol mengenai kerukunan sosial di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan negara ini dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang aktif dan strategis dalam mengelola keberagaman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah Singapura guna mendorong keharmonisan sosial, termasuk Kebijakan Integrasi Etnis (EIP), Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Beragama (MRHA), serta berbagai program komunitas yang memperkuat toleransi antar kelompok etnis dan agama. Studi ini juga mengkaji tantangan yang timbul akibat ketimpangan

struktural dan perubahan sosial di era modern, termasuk insiden yang menguji sensitivitas budaya dalam masyarakat multikultural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Singapura dalam menjaga keamanan nasional sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menggabungkan multikulturalisme dengan kebijakan inklusif yang menekankan persatuan dan kesetaraan, sambil tetap responsif terhadap dinamika global dan lokal yang kompleks. Penelitian ini memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana keharmonisan sosial dapat menjadi landasan utama bagi keamanan dan stabilitas negara yang kaya akan keberagaman budaya.

Kata kunci: keamanan nasional, keharmonisan sosial, stabilitas sosial, singapura.

PENDAHULUAN

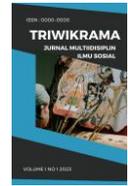
Singapura dikenal sebagai salah satu negara paling multikultural di kawasan Asia Tenggara. Sejak lama, negara ini menjadi pusat perdagangan yang menarik kedatangan para migran dari berbagai penjuru dunia. Keberagaman etnis, agama, dan budaya pun tumbuh dan berkembang secara berdampingan di sana. Dalam rangka menjaga toleransi serta keharmonisan antar kelompok etnis dan agama, pemerintah Singapura menerapkan berbagai kebijakan multikultural yang bertujuan untuk mendorong sikap moderat dan saling menghormati di tengah keragaman masyarakat. Etnis Tionghoa merupakan kelompok mayoritas di negara ini, mencakup sekitar tiga perempat dari total populasi. Kekayaan multikultural Singapura tidak hanya tercermin dalam kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga dalam kebijakan publik yang mendukung terciptanya keharmonisan antar kelompok. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah program Pelatihan Rasa Kebersamaan, yang bertujuan mempererat hubungan lintas etnis. Secara keseluruhan, multikulturalisme telah menjadi bagian penting dari identitas nasional Singapura dan merupakan kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, majemuk, dan harmonis.



Kedatangan Inggris pada abad ke-18 awalnya menjadikan Singapura sebagai tempat persinggahan untuk mengisi kembali persediaan makanan, melakukan perawatan armada kerajaan, serta menghambat ekspansi Belanda di Asia Tenggara. Kemudian, di bawah kepemimpinan Sir Stamford Raffles, Singapura dikembangkan menjadi pusat perdagangan utama. Kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan menarik banyak pedagang dari berbagai penjuru Asia dengan latar belakang etnis yang beragam untuk menetap di sana. Konsep multikulturalisme di Singapura menekankan prinsip kemandirian, keadilan, dan kesetaraan tanpa pendekatan yang saling meniadakan kepentingan kelompok lain (*zero sum*). Sejak era kolonial pada abad ke-19 dan 20, imigran dari India, Tiongkok, serta wilayah kepulauan Melayu dan Indonesia mulai berdatangan ke Singapura dalam upaya mencari kehidupan yang lebih baik. Saat ini, komposisi etnis di Singapura terdiri atas komunitas Tionghoa, Melayu, India, Eurasia, dan Peranakan. Berdasarkan studi *Pew Research Center* tahun 2014, Singapura dinobatkan sebagai salah satu negara dengan keragaman agama tertinggi di dunia, di mana masyarakat dari berbagai kepercayaan dapat hidup berdampingan, bekerja sama, dan menjalankan ibadah dalam suasana yang harmonis.

Keberagaman agama di Singapura tergolong luar biasa jika dilihat dalam konteks global, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara yang umumnya didominasi oleh satu agama mayoritas. Di Singapura, tidak ada satu pun agama yang dianut oleh lebih dari sepertiga penduduk, menurut data sensus terbaru. Laporan dari *Pew Research Center* tahun 2014 bahkan menempatkan Singapura sebagai negara dengan tingkat keragaman agama tertinggi di dunia. Masyarakat Singapura menunjukkan tingkat toleransi dan penerimaan antar umat beragama yang sangat tinggi, sebagaimana tercermin dalam berbagai indikator sosial. Tingginya toleransi ini berkaitan erat dengan sejarah koeksistensi antaragama yang sejak lama didorong oleh kebijakan negara. Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1965, pemerintah Singapura secara konsisten menanamkan nilai bahwa keberagaman ras dan agama merupakan fondasi utama bangsa. Berbagai agama besar dunia memiliki penganut di Singapura. Di antara orang dewasa, sekitar 26% mengidentifikasi diri sebagai Buddhis, 18% sebagai Muslim, 17% sebagai Kristen, 8% sebagai Hindu, 6% sebagai penganut agama tradisional Tionghoa seperti Taoisme atau Konfusianisme, dan 4% memeluk agama lain termasuk kepercayaan lokal. Sementara itu, sekitar 22% penduduk tidak berafiliasi dengan agama mana pun. Mayoritas warga Singapura menilai keragaman yang ada di negara mereka sebagai hal positif. Sebanyak 56% menyatakan bahwa keberadaan berbagai agama, etnis, dan budaya membuat Singapura menjadi tempat tinggal yang lebih baik. Hanya 4% yang merasa keragaman ini membuat negara menjadi tempat yang kurang nyaman, sementara 37% menilai dampaknya netral. Menariknya, warga yang sangat religius justru menunjukkan dukungan lebih besar terhadap keberagaman nasional. Mereka yang menganggap agama sebagai bagian penting dalam hidup mereka cenderung lebih optimis bahwa keragaman agama, etnis, dan budaya menjadikan Singapura tempat tinggal yang lebih baik (65% dibandingkan dengan 52% dari warga yang kurang religius).

Singapura menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasionalnya. Terletak di lokasi strategis di Selat Malaka salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia dan krusial bagi perdagangan internasional, Singapura memiliki posisi yang



sangat penting secara geopolitik. Namun, ukuran wilayahnya yang kecil menjadikannya rentan terhadap berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Negara ini berbatasan dengan dua kekuatan regional besar, yaitu Malaysia dan Indonesia, yang secara geopolitik maupun militer memiliki potensi menjadi ancaman. Oleh karena itu, isu keamanan nasional menjadi fokus utama pemerintah Singapura.

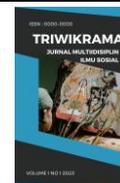
Letak geografisnya membuat Singapura sangat sensitif terhadap ancaman militer. Dengan lebar negara yang hanya sekitar 40 kilometer dari timur ke barat, wilayahnya dapat dijangkau oleh pesawat tempur dalam waktu kurang dari 10 detik. Hal ini menggambarkan betapa cepat dan mudahnya serangan militer dapat melumpuhkan infrastruktur vital dan membahayakan penduduk. Di samping itu, sejarah ketegangan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Indonesia, serta dinamika politik yang kompleks di kawasan Asia Tenggara, turut memperkuat kekhawatiran terhadap stabilitas wilayah. Sejak merdeka pada tahun 1965, Singapura terus merancang dan menerapkan berbagai strategi untuk menghadapi potensi ancaman tersebut.

Salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas sosial di Singapura di tengah potensi konflik horizontal terlihat dari insiden yang terjadi pada Juli 2024. Dua siswa dari *Raffles Institution* dikenai tindakan disipliner karena mengenakan pakaian yang dinilai tidak pantas saat peringatan Hari Harmoni Rasial. Peristiwa ini memicu diskusi publik yang cukup luas mengenai pentingnya menjaga sensitivitas budaya dalam masyarakat multikultural. Meskipun Singapura dikenal memiliki tingkat kerukunan antar etnis yang tinggi, kejadian ini mengungkap bahwa pemahaman antarbudaya masih perlu ditingkatkan. Ekspresi budaya yang keliru, meskipun tampak sepele, dapat menimbulkan rasa tersinggung dan menciptakan potensi gesekan sosial, apalagi di era digital saat ini di mana persepsi publik dapat menyebar dengan sangat cepat. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran sentral dalam menanamkan nilai toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Insiden tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga harmoni sosial memerlukan kesadaran kolektif dan upaya berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat agar konflik horizontal dapat dihindari dan kohesi sosial tetap terjaga.

Selain isu nilai dan toleransi, ketimpangan struktural juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas hubungan antar etnis di Singapura. Salah satu contohnya tampak pada distribusi etnis dalam institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan penelitian oleh Botha (2022), dari 1.037 mahasiswa yang disurvei di universitas-universitas terkemuka di Singapura, sebanyak 88% merupakan etnis Tionghoa. Sementara itu, mahasiswa dari etnis Melayu dan India hanya berjumlah masing-masing 4,7% dari total responden. Data ini mencerminkan dominasi etnis Tionghoa dalam sektor pendidikan tinggi yang tidak mencerminkan proporsi keberagaman etnis nasional secara adil.

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya hambatan sistemik yang masih dihadapi kelompok minoritas, seperti keterbatasan dalam aspek ekonomi dan akses yang belum merata terhadap pendidikan bermutu. Kurangnya representasi etnis minoritas di perguruan tinggi juga berpotensi memperkuat kesenjangan sosial dan mengurangi peluang terjadinya interaksi lintas budaya yang konstruktif. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan berbagai program bantuan seperti MENDAKI dan SINDA, temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif agar setiap kelompok etnis memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tinggi di Singapura.

Pemerintah Singapura melaksanakan kebijakan multikulturalisme sebagai strategi untuk membentuk identitas nasional yang harmonis. Dengan menghargai keberagaman etnis dan budaya, pemerintah berupaya membangun rasa kebersamaan di antara seluruh warga.



Kebijakan ini mencakup penetapan bahasa resmi, penerapan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai multikultural, serta penyelenggaraan berbagai acara budaya yang melibatkan seluruh kelompok etnis. Upaya tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang didasarkan pada saling menghargai dan memperkuat hubungan antar komunitas. Di sisi lain, dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, khususnya persaingan antara negara-negara besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, turut memengaruhi keamanan nasional Singapura. Dalam situasi persaingan pengaruh antara kedua kekuatan global tersebut, Singapura dituntut untuk mengelola hubungan diplomatiknya secara hati-hati agar tidak terperangkap dalam konflik. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan luar negeri yang realistis dan seimbang menjadi sangat penting dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional.

METODE PENELITIAN

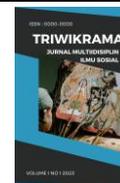
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan strategi yang diterapkan pemerintah Singapura dan masyarakat dalam menjaga keamanan melalui keharmonisan budaya. Pendekatan ini digunakan karena dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai konteks sosial serta implementasi kebijakan multikultural yang berlaku di negara tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap berbagai sumber otoritatif, termasuk dokumen kebijakan pemerintah, laporan dari lembaga terkait, dan literatur akademik yang relevan.

KAJIAN TEORITIS

Teori identitas nasional dan integrasi sosial

Kedatangan Inggris membawa perubahan besar terhadap struktur sosial dan ekonomi di Singapura. Letak geografisnya yang berada di persimpangan antara Timur dan Barat membuat Raffles melihat potensi besar untuk menjadikan wilayah ini sebagai pelabuhan utama dalam jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Singapura kemudian dikenal karena posisi strategisnya di sepanjang jalur pelayaran internasional serta keunggulan pelabuhannya. Sebagai pelabuhan penting dan strategis, wilayah ini menarik banyak imigran, terutama yang ingin memperoleh keuntungan ekonomi. Pada tahun 1867, pemerintah kolonial mulai mempekerjakan imigran India sebagai tentara, pegawai toko, aparat sipil, guru, dan buruh. Selain itu, imigran dari wilayah sekitar seperti Malaysia dan Indonesia juga turut meningkatkan jumlah penduduk di Singapura. Saat itu, masyarakat diklasifikasikan berdasarkan kelompok etnis seperti Tionghoa, Melayu, India, dan lainnya, yang kemudian membentuk komunitas sosiologis tersendiri atau disebut juga sebagai bangsa (*nation*). Pasca kemerdekaannya, Singapura menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan. Sebagai negara kecil dengan luas hanya 586,5 kilometer persegi dan populasi sekitar 2,93 juta jiwa (*Fact & Picture of Singapore*, 1995), Singapura kekurangan sumber daya alam dan bahkan sumber daya air. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam membangun kehidupan bernegara. Selain itu, kerentanan lain muncul dari segi demografis, karena sebagian besar penduduk Singapura adalah etnis Tionghoa yang tinggal di wilayah yang secara geografis dikelilingi oleh negara-negara mayoritas Muslim, terutama dari kelompok etnis Melayu, sehingga Singapura berada dalam posisi yang cukup rentan secara geopolitik.

Singapura merupakan negara kosmopolitan yang mayoritas penduduknya berasal dari kelompok migran, menjadikannya negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia setelah Monako (Tan et al., 2013). Dengan jumlah penduduk sekitar 5,7 juta jiwa, kepadatan ini bukan satu-satunya hal yang mencolok



keanekaragaman etnis, bahasa, dan budaya juga menjadi ciri utama negara-kota ini. Terdapat empat kelompok etnis utama di Singapura, yaitu Tionghoa (74,3%), Melayu (13,3%), Tamil (9,1%), dan kelompok “lainnya” yang mencakup warga keturunan Barat (seperti dari Australia dan Inggris) maupun Asia (seperti dari Thailand, Filipina, dan Indonesia). Keberadaan kelompok-kelompok etnis ini berkaitan dengan berbagai periode dalam sejarah migrasi Singapura.

Keberagaman bahasa merupakan aspek penting dari identitas nasional Singapura. Pemerintah menilai bahwa pelestarian keragaman ini penting karena menjadi bagian integral dari jati diri negara. Melalui kebijakan pendidikan, pemerintah mewajibkan pembelajaran dua bahasa sejak tingkat dasar, yaitu bahasa ibu dan satu bahasa resmi lainnya, untuk memastikan setiap siswa tetap terhubung dengan akar budayanya. Setiap bahasa mewakili kelompok etnis tertentu, dan dari empat bahasa resmi, bahasa Melayu memiliki kedudukan istimewa sebagai bahasa nasional dan resmi. Pemberian status khusus kepada bahasa Melayu mencerminkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan masyarakat Melayu ke dalam struktur kenegaraan. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan afirmatif lainnya, termasuk pengakuan terhadap status pribumi dan pemberian hak-hak khusus kepada masyarakat Melayu untuk membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi mereka.

Bahasa Mandarin dipilih sebagai bahasa resmi di Singapura karena komunitas Tionghoa merupakan mayoritas penduduk. Akan tetapi, tidak semua anggota komunitas ini berbicara dalam bahasa atau dialek yang sama. Untuk meningkatkan komunikasi dan mempersatukan komunitas. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi Singapura. Bahasa Inggris adalah bahasa bisnis, perdagangan, dan administrasi. Tanpa bahasa Inggris, Singapura tidak akan menjadi pusat kekuatan ekonomi seperti sekarang ini. Selain itu, sebagai bahasa asing, bahasa Inggris bertindak sebagai bahasa netral yang menyatukan berbagai suku dan bahasa yang digunakan di Singapura, sehingga mendorong kohesi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Strategis Pemerintah Singapura

Sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang tinggi, Singapura telah merancang sejumlah kebijakan strategis guna mempertahankan stabilitas sosial dan memperkuat integrasi nasional. Pemerintah memandang pentingnya peran aktif negara dalam mencegah disintegrasi masyarakat akibat segregasi sosial, dan oleh karena itu mengembangkan pendekatan komprehensif yang mencakup regulasi hukum, kebijakan spasial, serta program-program budaya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis, dengan menekankan prinsip hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman.

Tiga kebijakan utama yang menjadi pilar dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan sosial di Singapura antara lain: *Ethnic Integration Policy* (EIP) yang mengatur distribusi etnis di kawasan permukiman, *Maintenance of Religious Harmony Act* (MRHA) yang menjadi landasan hukum dalam menjaga toleransi antaragama, serta peringatan *Racial Harmony Day* yang merupakan sarana edukatif dan kultural untuk menumbuhkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya persatuan. Ketiganya bekerja secara sinergis dalam mendukung pembangunan masyarakat yang toleran dan kohesif.

Ethnic Integration Policy (EIP)

Pada tanggal 16 Februari 1989, Menteri Pembangunan Nasional Singapura saat itu, S. Dhanabalan secara resmi memperkenalkan Kebijakan Integrasi Etnis (EIP) di parlemen. Pada bulan Januari tahun yang sama, ia menekankan munculnya kantong-kantong etnis di perumahan Dewan Perumahan dan Pembangunan (HDB). Untuk menyoroti hal ini melalui contoh-contoh, ia merujuk ke lingkungan perumahan di Bedok dan Tampines, tempat rumah tangga Melayu merupakan lebih dari 30% dari total populasi perumahan. Ia juga merujuk ke Hougang, tempat lebih dari 90% rumah tangga terdiri dari komunitas Tionghoa. Berdasarkan EIP, pemerintah menetapkan kuota etnis untuk lingkungan dan blok HDB. Bagi komunitas Melayu, rasio yang diizinkan adalah 22% flat di setiap lingkungan, dan rasio flat yang diizinkan di setiap blok adalah 25%. Bagi komunitas Tionghoa, rasio yang diizinkan adalah 84% untuk lingkungan dan 87% untuk blok. Bagi kelompok etnis lainnya, rasio dikurangi menjadi masing-masing 10% dan 13%. EIP diberlakukan untuk melestarikan identitas multikultural Singapura dan mempromosikan integrasi dan keharmonisan ras. EIP memastikan adanya campuran yang seimbang dari berbagai komunitas etnis di kota-kota HDB. Batasan EIP ditetapkan di tingkat blok dan lingkungan berdasarkan susunan etnis Singapura.

EIP, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1989, mencegah terbentuknya kantong-kantong etnis di kawasan HDB dengan menetapkan batasan jumlah rumah tangga setiap ras dalam setiap lingkungan dan blok. Tujuan EIP adalah untuk mencegah terbentuknya enklave etnis di kawasan perumahan HDB. Hal ini dilakukan dengan membatasi jumlah rumah tangga di setiap komunitas dalam setiap lingkungan dan blok, melalui proporsi yang diizinkan seperti yang disebutkan di atas. Hal ini dilaksanakan mengingat skenario sosial-politik pada saat itu, yaitu ketika pengelompokan komunal menjadi fenomena yang lazim. Selain itu, pasar penjualan kembali HDB menjadi lebih aktif pada tahun 1980-an. EIP bekerja dengan menetapkan kuota ras pada kepemilikan rumah susun di tiap blok dan lingkungan berdasarkan susunan etnis di Singapura. Terakhir kali batasan etnis diperbarui secara publik adalah pada tahun 2010. Di tingkat lingkungan, kuotanya adalah 84 persen untuk warga Tionghoa, 22 persen untuk warga Melayu, dan 12 persen untuk warga India dan kelompok etnis minoritas lainnya.

Maintenance Of Religious Harmony Act (MRHA)

Kementerian Dalam Negeri (MHA) mengambil sikap tegas terhadap ancaman terhadap ras dan kerukunan beragama di Singapura. Undang-undang, seperti Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Beragama, memperkenalkan kewenangan yang memungkinkan tindakan pencegahan diambil untuk menjaga kerukunan beragama di Singapura. Undang-Undang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (MRHA) pertama kali diberlakukan pada tahun 1990 untuk memberikan Pemerintah kewenangan yang diperlukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Singapura. Gerakan ini mendorong toleransi dan moderasi di antara berbagai kelompok agama. Pada saat yang sama, gerakan ini juga berupaya memastikan bahwa agama dipisahkan dari politik. Pada tahun 2019, amandemen diperkenalkan pada MRHA untuk memungkinkan Kementerian Dalam Negeri (MHA) menanggapi insiden ketidakharmonisan agama secara lebih efektif, serta memperkuat perlindungan terhadap pengaruh asing yang dapat mengancam kerukunan umat beragama di negara tersebut.

• Pasal 17F dan Implikasi Hukum

Pasal 17F dari *Maintenance of Religious Harmony Act* (MRHA) mengatur secara ketat larangan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu keharmonisan antarumat beragama di Singapura. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap individu dilarang untuk:

- Menciptakan permusuhan, kebencian, atau niat jahat antar kelompok keagamaan;
- Melakukan penghinaan terhadap ajaran atau simbol-simbol suatu agama;
- Menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau menyinggung perasaan keagamaan orang lain.

Keunikan dari ketentuan ini terletak pada sifatnya yang ekstrateritorial, yakni memungkinkan penerapan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Singapura apabila dampaknya dirasakan dalam konteks sosial domestik. Bagi pelanggar, ancaman hukum mencakup denda, hukuman penjara hingga lima tahun, atau kombinasi keduanya. Namun demikian, sistem hukum Singapura tetap memberikan ruang pembelaan. Jika terdakwa dapat menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat pribadi, tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, dan dilaksanakan dalam situasi yang secara wajar tidak dapat diketahui pihak luar, maka yang bersangkutan dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum.

Berbagai langkah dalam UU MRHA untuk melindungi kelompok agama singapura dari pengaruh asing bertindak sebagai berikut:

- Secara langsung Pemerintah menetapkan ketentuan mengenai status kewarganegaraan bagi individu yang menduduki posisi kepemimpinan dalam organisasi keagamaan, sebagai langkah untuk mengurangi potensi campur tangan pihak asing dalam urusan keagamaan di dalam negeri.
- Secara tidak langsung, Pemerintah turut melakukan pengawasan dan regulasi terhadap arus dana asing serta hubungan afiliasi antara organisasi keagamaan lokal dengan pihak luar negeri. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah masuknya ideologi atau kepentingan eksternal yang berpotensi mengganggu stabilitas kerukunan antarumat beragama di dalam negeri.

Strategi pengelolaan yang terdiri dari dua lapisan tersebut menggambarkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan sosial dan budaya di era globalisasi, sekaligus memperkuat perlindungan hukum atas prinsip-prinsip pluralisme yang menjadi dasar kehidupan beragama masyarakat Singapura.

Melakukan tindakan yang mungkin merupakan pelanggaran menurut MRHA tidak secara otomatis mengakibatkan denda atau hukuman penjara. Alih-alih dituntut, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dapat diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan melakukan kegiatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang masyarakat multi-agama di Singapura. Kegiatan ini dikenal sebagai *Community Remedial Initiative* (CRI). Berdasarkan CRI, MHA dapat, atas kebijakannya sendiri, menawarkan seseorang yang telah melukai perasaan komunitas agama lain kesempatan untuk melakukan aktivitas yang dapat membantu mereka lebih memahami komunitas agama yang terdampak, dan memperbaiki hubungan dengan mereka. CRI dapat mencakup penyampaian permintaan maaf secara publik atau pribadi kepada pihak-pihak yang terdampak, atau berpartisipasi dalam program komunitas antaragama. Undang-undang di bawah MRHA memperkuat kebutuhan untuk menjaga kerukunan multiras dan multi-agama di Singapura, yang tidak dapat dianggap remeh.

Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut diusulkan. Amandemen tersebut disahkan pada 7 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada 1 November 2022. Amandemen tersebut mencakup undang-undang :

- Melindungi organisasi keagamaan lokal dari pengaruh asing dalam bentuk peran kepemimpinan atau sumbangan asing,
- Memberlakukan perintah penahanan yang diubah agar berlaku segera, bukan pemberitahuan 14 hari dari pemerintah sebelumnya, dan
- Menawarkan inisiatif perbaikan masyarakat bagi calon pelanggar sebagai pengganti kemungkinan tuntutan pidana.

Racial Harmony Day

Hari Kerukunan Ras jatuh pada tanggal 21 Juli dan Asosiasi Rakyat (PA) merayakan 64 tahun mempromosikan kerukunan ras di Singapura. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1960 sebagai badan hukum untuk mempromosikan kerukunan antar ras dan kohesi sosial di Singapura, tujuannya adalah untuk memicu dan memelihara peran serta masyarakat demi terwujudnya Singapura yang peduli dan bersatu. PA menyelenggarakan beragam program dan aktivitas yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa membedakan ras, agama, bahasa, maupun status sosial-ekonomi. Kegiatan-kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bersama yang mendorong terjadinya interaksi konstruktif antarwarga dari berbagai komunitas, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman serta penghargaan terhadap keberagaman.

a. Kegiatan komunitas

Berbagai program kerukunan antar ras di tingkat lokal kerap digagas dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi akar rumput dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan toleransi di antara tetangga dari latar belakang ras yang berbeda. Inisiatif-inisiatif ini berperan penting dalam membangun jembatan komunikasi dan interaksi sosial antar komunitas, sehingga mampu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat rasa persaudaraan. Program-program tersebut biasanya dirancang agar mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga partisipasi yang inklusif dapat tercapai.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian yang lebih besar diberikan pada program-program yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat untuk memperdalam pemahaman lintas ras. Pendekatan ini tidak hanya sekadar mempertemukan individu dari berbagai latar belakang etnis, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kegiatan bersama. Dengan cara ini, warga dari berbagai komunitas dapat berkolaborasi secara langsung, memperkuat hubungan sosial, serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghargai perbedaan.

b. Program seni dan budaya

PA menyelenggarakan berbagai program seni dan budaya yang menonjolkan kekayaan warisan multikultural Singapura. Program-program ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga wahana edukasi dan apresiasi terhadap keberagaman budaya yang ada. Beberapa program utama yang rutin diselenggarakan antara lain:

1. Gelombang suara

Soundwaves adalah konser khas PA yang merayakan kerukunan antar ras dan mempromosikan bakat-bakat lokal di Singapura. Inti dari konser tahunan ini adalah penampilan oleh PA *Talents*, dengan 10 unit pertunjukan dan lebih dari 300 musisi dan penari. Konser ini sering kali mempertemukan nama-nama besar di industri ini. Penampil yang pernah tampil di *Soundwaves* sebelumnya termasuk Dick Lee, Jeremy dan Claressa Monteiro, George Chan, Eunice Olsen, Brian Richmond, dan banyak lagi.

2. Musim bakat PA

PA Serangkaian konser ini menampilkan berbagai kelompok musik dan tarian tradisional yang mewakili komunitas etnis yang beragam di Singapura, seperti Tionghoa,

Melayu, India, dan kelompok minoritas lainnya. Setiap pertunjukan tidak hanya menunjukkan keindahan seni dan budaya dari masing-masing kelompok, tetapi juga menonjolkan nilai-nilai serta warisan budaya unik yang menjadi bagian dari keragaman bangsa. Tujuan utama dari rangkaian konser ini adalah untuk memperkenalkan dan mengapresiasi kekayaan budaya Singapura kepada masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang etnis, sehingga menciptakan ruang inklusif bagi dialog budaya dan pemahaman bersama.

Melalui pertunjukan yang beragam dan representatif, Asosiasi Rakyat (PA) berupaya memperkuat identitas nasional yang inklusif, di mana setiap warga merasa dihargai dan diakui. Program ini juga menjadi sarana untuk menghubungkan generasi muda dengan budaya mereka sendiri serta membuka wawasan mereka terhadap budaya lain. Dengan demikian, konser-konser ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi dan diplomasi budaya yang penting dalam memupuk rasa saling menghormati dan memperkuat kerukunan sosial di tengah masyarakat yang plural. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah Singapura dalam membangun masyarakat yang harmonis dan tangguh terhadap potensi konflik sosial.

3. *Gentarasa*

Gentarasa didirikan pada tahun 2002 sebagai sebuah inisiatif khusus yang bertujuan melestarikan dan mengembangkan seni budaya Melayu di Singapura. Program ini menjadi platform penting bagi kelompok pertunjukan Melayu yang aktif di *Community Clubs* (CCs) untuk menampilkan berbagai bentuk seni pertunjukan tradisional maupun kontemporer. Melalui panggung ini, para seniman dapat mengekspresikan kreativitas mereka sekaligus memperkuat identitas budaya Melayu dalam konteks masyarakat multikultural Singapura.

Nama "*Gentarasa*," yang berarti "Lonceng Ekspresi," mencerminkan semangat program ini untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan warisan budaya Melayu. Selain berfungsi sebagai sarana pertunjukan, *Gentarasa* juga memberikan ruang bagi pengembangan potensi para seniman dan generasi muda, sehingga tradisi budaya dapat terus hidup dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Program ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengenal dan menghargai seni Melayu. Lebih dari sekadar pertunjukan seni, *Gentarasa* berperan sebagai jembatan budaya yang mempererat hubungan antar komunitas di Singapura. Dengan mempromosikan seni budaya Melayu, program ini turut mendukung upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif, yang menghormati keberagaman dan memperkuat rasa persatuan nasional. *Gentarasa* menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kerukunan sosial dan memperkaya identitas budaya negara.

Secara keseluruhan, Hari Kerukunan Ras dan rangkaian program yang dijalankan oleh PA menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan budaya di Singapura. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara kegiatan komunitas dan seni budaya, pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun sebuah masyarakat yang tidak hanya toleran, tetapi juga saling menghormati dan merayakan keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.

KESIMPULAN

Pemerintah Singapura menerapkan berbagai kebijakan strategis yang menyeluruh untuk menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat integrasi nasional dalam masyarakat yang

beragam secara budaya dan etnis. Kebijakan-kebijakan kunci seperti *Ethnic Integration Policy* (EIP), *Maintenance of Religious Harmony Act* (MRHA), dan perayaan *Racial Harmony Day* berperan sebagai fondasi penting yang bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan damai. EIP bertugas mengatur penyebaran etnis di area pemukiman guna mencegah segregasi, MRHA menjaga toleransi antaragama dengan regulasi ketat dan pengawasan terhadap pengaruh asing, sementara *Racial Harmony Day* beserta program-program pendukungnya mendorong interaksi dan pemahaman lintas komunitas melalui berbagai kegiatan seni dan sosial.

Selain itu, inisiatif yang dijalankan oleh Asosiasi Rakyat (PA) serta kelompok akar rumput turut memperkuat kerukunan lewat berbagai program seni, budaya, dan aktivitas komunitas yang bersifat inklusif dan mendidik. Kegiatan seperti *Soundwaves*, Musim Bakat PA, dan *Gentarasa* tidak hanya menampilkan keberagaman budaya Singapura, tetapi juga berfungsi sebagai media penghubung sosial yang memperkuat identitas nasional yang inklusif. Pendekatan terpadu ini membuktikan keberhasilan Singapura dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, serta saling menghormati perbedaan sebagai modal utama kekuatan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Advice, Singapore Legal. "Guide to Singapore's Maintenance of Religious Harmony Act". January 13, 2024. <https://singaporelegaladvice.com/law-articles/singapore-maintenance-of-religious-harmony-act/>.
- Agrawal, Ritik. "ETHNIC INTEGRATION POLICY (EIP)". March 1, 2025. <https://www.jusscriptumlaw.com/post/ethnic-integration-policy-eip>.
- Association, People. "Racial Harmony Day". juni 11, 2025. <https://www.pa.gov.sg/our-programmes/racial-harmony/racial-harmony-day/>.
- Board, Housing & Development. "Ethnic Integration Policy (EIP) and Singapore Permanent Resident (SPR) Quota". February 6, 2025. <https://www.hdb.gov.sg/residential/buying-a-flat/buying-procedure-for-resale-flats/plan-source-and-contract/planning-considerations/eip-spr-quota>.
- Datetimeonline. "Racial Harmony Day 2025 in Singapore". Mei 2025. <https://www.datetimeonline.com/holidays/singapore/racial-harmony-day>.
- Eldrida Yeong, Wi en ng. "Identity crisis is our identity: Cultural Cringe and the Search for a Singaporean Identity through Nationalism". March 17, 2023. <https://advance.sagepub.com/doi/full/10.31124/advance.24144369.v1>.
- Encyclopaedia Britannica. "The people of Singapore". Juni 10, 2025. <https://www.britannica.com/place/Singapore/The-people>.
- Eraou, Song. "The political economy of race in singapore: unpacking the PAP's race-based approaches". October 30, 2024. <https://newnaratif.com>.
- Government, Singapore. "HDB's Ethnic Integration Policy: Why it still matters". April 13, 2020. <https://www.gov.sg/explainers/hdb-s-ethnic-integration-policy--why-it-still-matters>.
- Izzul Haziq Murad, Matius Matius. "Commentary: the CMIO model should be a tool for harmony not another method for stereotyping". February 14, 2025. <https://www.channelnewsasia.com/.commentary/cmio-race-government-framework-citizen-identity-4935941>.
- Marco Rizzi, Sofia Manaresi. "The Singaporean Melting pot: How National identity and Multiculturalism power economic success". April 17, 2023.



<https://mondointernazionale.org/focus-allegati/the-singaporean-melting-pot-how-national-identity-and-multiculturalism-power-economic-success>.

Novianty, Tiara Putri. "Perpaduan Ragam Budaya di Singapura Menjadi Penunjang Besar Perekonomian". Maret 28, 2022. <https://kumparan.com/tiara-putri-novianty/perpaduan-ragam-budaya-di-singapura-menjadi-penunjang-besar-perekonomian-1xlwoQQVvwe/full>.

Ting, Wong Pei. "ST Explains: What is the Ethnic Integration Policy and how does it work?" August 2, 2024. <https://www.straitstimes.com/singapore/st-explains-what-is-the-ethnic-integration-policy-and-how-does-it-work>.